

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Aminuddin Ilmar, 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*, PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta.

Ani Sri Rahayu, 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika: Jakarta.

Hanif Nurcholish, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta.

Jilmly Asshidiqie, 2010. *Perihal Undang-undang*, Rajawali Press: Jakarta.

L, Ansori, 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press: Malang.

Lukman hakim 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara: Malang.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanasius: Yogyakarta.

Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Romy Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, 2006. LaksBang PRESSindo: Yogyakarta.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian "Polri dan Good Governace"*, 2008. Laksbang Mediatama: Surabaya.

Soerjono Soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, UI Press: Jakarta

Yusnani hasyimzoem, Iwan, satriawan, dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.



Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah.

SK Kepala BKN No.k.26-20 /V.24.25 /99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas.

Jurnal

Fransica sica, “Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.1, Maret 2018.

Herlina Nova, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat POLRI Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *jurnal Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4, September-Desember tahun 2018

Muradi, *Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol 1.No.2, 2015

Internet

dari <https://www.polisi.com/urutan-lambang-pangkat-polisi>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaksana_Tugas

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/15a0cc439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--iniuu-yang-potensi-dilanggar-mendagri>

<http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/02/14/analisis-kerancuan-peraturan-mendagri-12018?page=all>.

Dewi Sendhikasari D, Wacana Pejabat Gubernur Dari Polri,

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-3-I-P3DI-

Februari-2018- 207.pdf

F.Marhaban, *Tata Cara Pembuatan Surat Keputusan*,

<http://www.slideshare.net/mobile/presentase-Surat Keputusan>.

